

**KEDUDUKAN HUKUM HAK INGKAR NOTARIS PENGGANTI DALAM
MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Oleh:

LAKSMININGRUM DEWI MUMPUNI

2120122032

Pembimbing :

- 1. Prof.Dr. Zainul Daulay,SH.,MH**
- 2. Dr. Yuslim,SH.,MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

KEDUDUKAN HUKUM HAK INGKAR NOTARIS PENGGANTI DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Laksminingrum Dewi Mumpuni, 2120122032, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti dalam sistem kenotariatan di Indonesia, suatu isu yang masih menghadapi kekosongan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hak ingkar merupakan hak bagi Notaris untuk menolak memberikan keterangan atau membuka rahasia jabatan kepada pihak ketiga, termasuk aparat penegak hukum, sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan para pihak serta menjaga martabat profesi. Meskipun Notaris Pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan Notaris definitif, UUJN tidak secara tegas mengatur hak ingkar bagi mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder berupa literatur dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, didukung teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, serta doktrin *rechtsvinding* Paul Scholten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ingkar seharusnya juga melekat pada Notaris Pengganti. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UUJN dan penghapusan perlindungan melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menimbulkan disharmoni norma dan melemahkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, reformulasi UUJN dan peraturan pelaksanaannya diperlukan guna mempertegas keberlakuan hak ingkar Notaris Pengganti, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan profesi dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Kata kunci: Kedudukan Hukum, Hak Ingkar, Notaris Pengganti, UUJN, Kepastian Hukum.



KEDUDUKAN HUKUM HAK INGKAR NOTARIS PENGGANTI DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Laksminingrum Dewi Mumpuni, 2120122032, Master of Notarial Law Program, Postgraduate School, Faculty of Law, Andalas University, 2025.

ABSTRACT

This study analyzes the legal status of the right of refusal (hak ingkar) for Substitute Notaries in Indonesia, an area that remains legally uncertain under the Notary Law (Undang-Undang Jabatan Notaris / UUJN). The right of refusal enables notaries to decline providing testimony or disclosing confidential information obtained in their official capacity, thereby protecting both the parties' privacy and the dignity of the notarial profession. Although Substitute Notaries exercise the same authority and responsibilities as permanent notaries, the UUJN does not explicitly recognize their right of refusal, creating a legal vacuum that undermines legal certainty. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Primary sources include legislation and court rulings, while secondary sources consist of academic literature and expert opinions. The analysis applies deductive reasoning, grounded in Radbruch's theory of legal certainty, Hadjon's theory of legal protection, and Scholten's doctrine of rechtsvinding. Findings indicate that Substitute Notaries should, in principle, hold the same right of refusal as permanent notaries. However, the absence of explicit regulation, particularly following the exclusion of Substitute Notaries from Ministerial Regulation No. 17 of 2021 has resulted in normative disharmony and weakened legal safeguards. The study concludes that reformulation of the UUJN and its implementing regulations is necessary to establish legal clarity, reinforce professional protection, and uphold justice in notarial practice.

Keywords: Legal Status, Right of Refusal, Substitute Notary, UUJN, Legal Certainty.

